

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD

1. Hari, tanggal : Senin, 27 April 2026
2. W a k t u : Pukul 09.00 WIB S/d Selesai
3. T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo
4. Keterangan : Pertemuan dengan Tata Muka
 - I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna .
 - II. SIFAT RAPAT : Terbuka untuk umum
 - III. ACARA RAPAT :
 1. Laporan Badan Anggaran
 2. Penetapan Keputusan DPRD
 3. Penyerahan Rekomendasi LKPJ Bupati Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2025 dari DPRD kepada Bupati
 4. Sambutan Bupati
 - IV. PIMPINAN RAPAT
 1. Nama : TUNARYO, S.Sos
 2. Jabatan : Ketua DPRD
 - V. SEKRETARIS RAPAT
 1. Nama : Agus Ari Setiyadi, S.Sos
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD
 - VI. JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR : 35 orang dari 45 Anggota DPRD
 1. Terdiri dari :
 - a. Fraksi PDI-Perjuangan
 1. Tunaryo, S.Sos
 2. Jaka Hartana
 3. Drs Subeno
 4. Alipman Syafi'i, SE
 5. Rendi Aditya Saputra
 6. H. Cipto Waluyo
 7. Roy Adinata Sutanto
 - b. Fraksi Partai Golongan Karya
 1. Rokhman, S.Sos
 2. Sri Susilowati, SE
 3. Sutardi.
 4. Danan Purnomo, SH, M.Si

5. Roni Sumhastomo, SE
6. Rani Summadiyaningrum, S.Farm.Apt.
7. Dwi Hartati. S.Sos
8. Akhmad Afif, S.Pd.I
9. Sumitro, A.Md
10. Berliando Luthfi Zulfikar, S.Psi

c. Fraksi Partai Demokrat

1. Estri Utami Setyowati, ST
2. Sigit Apriyanto, ST
3. H. Rujiyanto, S.Ag., MM
4. Sekar Ati Argorini, A.Md

d. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. Rudi Hartono, SH
2. H. Much Dahlan, SE
3. H. Shokibal Untung
4. Abtadiussholikhin, S.H.I

e. Fraksi Partai NasDem

1. Fidhy Kiawan, SP
2. Hj. Tursiyati, SE
3. Eko Januar susanto, SH., MH
4. Ivan Fatchan Gani W, SE

f. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

1. Awan Yogaa Kurniawan
2. Muharomah, S.H.
3. Endang Tavip Handayani, SH
4. Nurhidayat Pramudyanto,
5. Ajeng Dewi Purnamasari, SH., MH

g. Fraksi Persatuan Sejahtera

1. KH. Akhmad Tawabi, S.Sos
2. Akhmad Ngafifurrohman. S.Pd.I
3. Akhmad Ridho Adi Nugroho, ST

2. Tidak Hadir :

a. Fraksi PDI-Perjuangan

1. Erwin Sulistiani

2. Timbul susilo
- b. Fraksi Partai Demokrat
 1. Yudha Ari Gunawan, S.P
 2. Hendro Susilo, SE
 3. Alfin Ma'ruf Pratama
- c. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
 1. Hj Nani Astuti, S.Pd
 2. H.Budi Sunaryo, SE
- d. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.
 1. Fero Setisono

VII. **JALANNYA RAPAT**

1. Pembukaan
2. Setelah melalui pembahasan yang intensif Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama dengan Eksekutif terkait Pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2025 maka berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD hari Kamis 27 Maret 2026 agenda Rapat adalah :
 - a. Penyampaian Laporan Badan Anggaran
 - b. Penetapan Keputusan DPRD
 - c. Penyerahan Rekomendasi LKPJ Bupati Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2025
 - d. Sambutan Bupati
3. Penyampaian Laporan Badan Anggaran Berdasarkan analisis dokumen LKPJ Bupati Purworejo akhir Tahun Anggaran 2025 ,maka ada beberapa Catatan dan rekomendasi penting sebagai masukan yang bersifat konstruktif kepada Bupati dan Pemerintah Daerah:

A.Catatan DPRD Kabupaten Purworejo atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purworejo Akhir Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kinerja Pembangunan

- Secara agregat menunjukkan capaian positif;
- Namun belum sepenuhnya mencerminkan pembangunan yang berkualitas dan merata;
- Pertumbuhan ekonomi belum ditopang oleh sektor unggulan daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

- Ketergantungan terhadap transfer pusat masih sangat tinggi;
- Belanja pegawai mendominasi struktur APBD;

- Belanja modal relatif rendah dan belum berdampak signifikan;
- Masih terdapat SILPA yang cukup besar, menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

3. Kinerja Perangkat Daerah

- Secara administratif, serapan anggaran relatif tinggi;
- Namun secara substantif, masih terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dan hasil;
- Kinerja antar perangkat daerah belum merata.

4. Permasalahan Strategis

DPRD mengidentifikasi beberapa permasalahan utama, yaitu:

- Lemahnya kinerja sektor pertanian sebagai sektor unggulan;
- Rendahnya kemandirian fiskal daerah;
- Belum optimalnya penciptaan lapangan kerja;
- Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan;
- Belum optimalnya efektivitas program pembangunan.

B.Rekomendasi DPRD Kabupaten Purworejo atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purworejo Akhir Tahun 2025, sebagai berikut

1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan hasil;
2. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat;
3. Melakukan reorientasi belanja daerah dari belanja rutin menuju belanja produktif;
4. Melakukan transformasi sektor pertanian menuju sistem agribisnis modern;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan;
6. Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui penguatan investasi dan pengembangan UMKM;
7. Memperkuat reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik.
8. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Purworejo masih jauh dari target, walaupun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya optimal, sehingga kedepannya diperlukan strategi yang efektif mengingat angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahun dengan adanya sekolah-sekolah menengah kejuruan yang jumlahnya luar biasa
9. Reformasi birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik, namun perlu kebijakan yang lebih tegas dan transparan, agar birokrasi di Kabupaten Purworejo dapat bekerja lebih profesional dan optimal, serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap negara dan masyarakat.
10. Purworejo sebagai salah satu daerah dengan rawan bencana yang cukup tinggi, sehingga butuh perhatian khusus dan serius dari Pemerintah Daerah.

11. Kabupaten Purworejo menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan di daerah Jawa Tengah bagian selatan, sehingga perlu dioptimalkan secara bijak, agar tidak menambah beban masyarakat secara umum.
12. Pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian harus dipertegas lagi, yaitu dengan evaluasi menyeluruh pada program kegiatan yang ada dan Pemerintah Daerah harus segera menyusun strategi yang lebih inovatif yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian.
13. Evaluasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purworejo harus menjadi prioritas, mengingat penurunan angka kemiskinan hanya sekian digit dengan upaya-upaya yang telah dilakukan, sehingga perlu analisis lebih mendalam terhadap kebijakan yang telah diterapkan dan Pemerintah Daerah harus menciptakan strategi yang lebih terarah dan inovatif agar setiap upaya yang dijalankan benar-benar efektif.
14. Kenapa investasi yang masuk di Kabupaten Purworejo tidak signifikan, padahal sudah diberikan kemudahan. Hal ini harusnya menjadi pertanyaan penting yang harus segera terjawab. Pemerintah Daerah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh serta penyusunan kebijakan dan strategi yang lebih inovatif dan berorientasi pada kebutuhan dunia usaha yang mampu meningkatkan daya tarik daerah bagi para investor.
15. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku dan harus ada transparansi sesuai arahan KPK RI pada saat rapat kerja nasional (Rakornas).
16. Perlunya tambahan anggaran di bidang pertanian dari Pemerintah Daerah harus menjadi perhatian serius, agar tidak menimbulkan kesan adanya pengkondisian semata untuk ketahanan pangan. Anggaran tersebut perlu diarahkan pada bidang diversifikasi dan modernisasi alat pertanian sebagai bagian dari strategi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
17. Pemerintah Daerah agar fokus pada kebijakan sistem kerja tuntas dalam arti luas, sehingga setiap program pembangunan dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
18. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pada tahun 2027 batas maksimal belanja pegawai ditetapkan sebesar 30% dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40%. Untuk Tahun 2027, alokasi belanja pelayanan publik Kabupaten Purworejo kedepan harus difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian yang mendukung hilirisasi produk pertanian, dan tidak hanya pada fasilitas dasar tetapi diarahkan untuk memperkuat rantai nilai pertanian hingga tahap pengolahan dan pemasaran.

4. Sambutan Bupati .

Sebagaimana amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2025 telah selesai dibahas oleh DPRD secara teliti, sehingga memberikan beberapa Rekomendasi , saran , kritik dan masukan maupun koreksi positif , dan konstruktif pada prinsipnya Bupati menerima dan akan ditindaklanjuti secara serius bersama dengan seluruh Perangkat Daerah disemua tingkatan dan bidang tugasnya termasuk BUMD maupun Pemerintahan Desa dan Kelurahan . Pemerintah Daerah berupaya secara maximal untuk mencapai sasaran RKPD tahun 2025 dengan terus meningkatkan kerjasama , koordinasi dan konsolidasi baik secara internal maupun lintas sektor dengan para pemangku kepentingan tapi juga sepenuhnya menyadari ahwa masih ada permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang perlu segera ditindaklanjuti

VIII. PENUTUP

Demikian Penyerahan Rekomendasi LKPJ Bupati Purworejo Akhir Tahun Anggaran 2025 dari DPRD kepada Bupati . Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Berkah dan RahkmatNya kepada kita sekalian untuk mewujudkan Kabupaten Purworejo yang lebih maju dan Sejahtera .

Wassallaamu'allaikum wr.wb

Purworejo, 27 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO





